

Drs Sukadari SE SH MM

## DIALOG

# Memahami ABK Melalui Pendidikan Inklusi yang Tepat

## Data Diri

Nama : Drs Sukadari SE SH MM  
Tempat/tanggal lahir : Bantul, 13 Juli 1957

## Riwayat Pendidikan :

- SD lulus tahun 1970
- SMP lulus tahun 1973
- SMA lulus tahun
- Sarjana Pendidikan di FKIP UNS lulus tahun 1982
- Sarjana Ekonomi UWMY lulus tahun 2004
- Sarjana Hukum UWMY lulus tahun 2007
- Pascasarjana UII lulus tahun 2000
- Sedang menyelesaikan program doktor (S3) di Prodi Ilmu Pendidikan UNY

## Riwayat Pekerjaan :

- Kepala SLB PGRI Jetis Bantul
- Ketua jurusan SGPB Negeri Yogyakarta
- Dosen Tetap Negeri Dipekerjakan (DPK) FKIP Fakultas PGSD UPY
- Wakil Ketua Dewan Pendidikan Bantul 2005-2008
- Penasehat Pengurus PGRI Bantul 2005-2010
- Koordinator Pengawas TK/SD/SDLB Bantul 1995-2000



Drs Sukadari SE SH MM

Menyoal pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) atau sering disebut difabel pada saat ini merupakan satu hal yang penting. Kesetaraan akan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat menjadi alasan untuk mengembangkan sistem pendidikan yang tepat bagi mereka.

Munculnya sekolah inklusi dianggap sebagai jawaban untuk memberikan akses pendidikan ABK agar setara dengan anak-anak lainnya. Namun kebijakan itu ternyata tak serta merta menyelesaikan permasalahan yang ada. Apa saja permasalahan itu dan bagaimana solusinya, dosen Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dan Pendidikan Luar Biasa (PLB) Universitas PGRI Yogyakarta, **Drs Sukadari SE SH MM** memaparkan komentarnya. Berikut wawancara wartawan Bernas Jogja, **Yvesta Putu Ayu** dengan **Sukadari** beberapa waktu lalu.

*Bagaimana dengan perkembangan program sekolah inklusi saat ini ?*

Meski sudah banyak menolong bagi ABK untuk memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam mengakses pendidikan, namun masih banyak pihak yang belum mengerti atau mema-

hami sistem pelaksanaannya di sekolah. Hal ini terjadi karena terbatasnya sosialisasi dan banyak pihak yang merasa tidak berkepentingan untuk mengerti lebih jauh tentang pendidikan inklusi.

*Pemahaman semacam apa yang masih kurang tentang pendidikan inklusi ?*

Selama ini sekolah inklusi diketahui untuk menampung ABK yang digabung bersama siswa reguler lain. Padahal sebenarnya pengertiannya jauh lebih luas. Sekolah ini tidak hanya mendidik anak yang cacat fisik seperti tuna netra, tuna rungu dan tuna daksa, namun juga semua anak berkebutuhan khusus seperti gelandangan, korban bencana, korban perkosaan dan lainnya.

*Bagaimana dengan sosialisasi konsep pendidikan inklusi selama ini ?*

Terbatasnya sosialisasi membuat masih banyaknya guru yang belum memahami secara komprehensif bagaimana menangani ABK di sekolah inklusi. Apalagi mereka juga harus mengurus siswa reguler lainnya. Sehingga seringkali sistem pendidikan yang diberikan pada ABK belum bisa optimal.



*Berbicara masalah kurikulum, bagaimana penerapannya bagi ABK ?*

Seharusnya kurikulum yang diterapkan di sekolah inklusi adalah model kurikulum umum yang dimodifikasi dan diindividualisasikan. Aplikasinya menggunakan prinsip-prinsip program pendidikan atau pembelajaran individual. Hal ini diperlukan karena setiap peserta didik yang tergolong ABK memiliki hambatan tertentu sehingga pelayanan pendidikannya pun berbeda dari yang lainnya.

*Apakah tenaga pendidik bagi ABK sudah mencukupi saat ini ?*

Guru ABK masih sangat minim hingga kini. Belum ada 10 persen dari kebutuhan guru sekolah inklusi yang cukup tinggi. Guru yang mengajar ABK di sekolah inklusi bahkan masih diampu guru pinjaman dari SLB(sekolah luar biasa-red) karena keterbatasan sumber daya yang ada. Persoalan ini makin diperparah dengan rancunya kewenangan kepegawaian guru SLB di sekolah inklusi. PLB (pendidikan luar biasa-red) saat ini berada dibawah naungan propinsi, sementara beberapa guru mereka mengajar di sekolah inklusi yang merupakan wewenang kabupaten/kota. Mereka harus melaporkan kegiatan ke propinsi padahal kerjanya di kabupaten/kota.

*Apa akibatnya dengan adanya persoalan itu ?*

Tentu saja sistem pendidikan

bagi ABK menjadi tidak bisa optimal dilakukan karena guru tidak memahami secara betul kebutuhan ABK secara mendalam. Penanganan ABK pun masih sering disamakan dengan anak pada umumnya sehingga terjadi pemaksaan kemampuan anak yang harus sama dengan yang lainnya karena menggunakan kurikulum yang sama. Bila dibiarkan ABK bisa drop out dan tidak bisa melanjutkan pendidikannya.

*Bagaimana dengan pendidikan guru PLB sendiri, apakah sudah banyak lembaga pendidikan tinggi yang bisa melahirkan tenaga pendidik untuk sekolah inklusi ?*

Baru sebagian perguruan tinggi yang memiliki program studi PLB. Namun karena peminat dan kuotanya yang terbatas, maka tidak banyak guru PLB yang dihasilkan untuk terjun ke sekolah inklusi. Padahal sebenarnya profesi ini cukup menjanjikan karena saingannya tidak terlalu banyak.

*Apa solusinya untuk mengatasi permasalahan itu ?*

Saya kira pendirian lembaga formal seperti sekolah tinggi di bidang PLB bisa mengatasi minimnya tenaga pendidik di sekolah inklusi. Apalagi banyak ABK yang tertarik di sekolah reguler dan kompetensi mereka pun tidak kalah dari anak-anak lainnya. Sekolah tinggi PLB ini akan melahirkan tenaga-tenaga ahli di bidang PLB untuk mencukupi kebutuhan guru di sekolah inklusi karena perkembangan sekolah itu semakin banyak saat ini. Di sekolah tinggi ini pula, maka kurikulum bagi ABK bisa dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan mereka.

*Apa peran pemerintah sendiri ?*

Pemerintah diharapkan mendukung pengembangan sistem pendidikan luar bisa, baik melalui dana bantuan maupun program lain. Apabila program sekolah inklusi dapat diperdakan akan lebih kuat lagi sehingga tidak ada alasan sekolah umum menolak kehadiran anak ABK untuk belajar bersama dengan anak

normal.

*- Apa harapan bapak dengan pendidikan inklusi melalui bermacam program itu ?*

Program ini bisa berhasil dengan baik apabila semua pihak menyadari kalau pendidi-

kan merupakan tanggungjawab bersama.

Menuntut ilmu serta belajar sebaiknya disadari sebagai hak setiap warga negara Indonesia, termasuk ABK. Mereka sepatutnya diberi kesempatan untuk mengoptimalkan kemampuan-

nya sehingga kelak mampu menjadi warga negara yang baik, mandiri, bertanggungjawab, berkepribadian Indonesia dan hidup damai, bahagia dan layak hidup di masyarakat umum sebagai pribadi yang bermartabat. (ptu)